

ANALISIS PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TIWA'A

(Studi Kasus di Desa Tiwa'a Kecamatan Mori Utara Kabupaten
Morowali Utara)

Herlan Lagantondo^{1)*}, Abd. Khalid Hs. Pandipa²⁾, Rilfayanti Thomassawa³
^{1,2,3)} Universitas Sintang Maroso Poso

*Corresponding E-mail: herlanlagantondo5@gmail.com

ABSTRAK

Program pemberdayaan masyarakat Desa Tiwa'a Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara di bidang kelembagaan belum memberikan manfaat yang diharapkan sehingga diperlukan suatu evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat bidang kelembagaan di Desa Tiwa'a. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan sumber data dalam penelitian ini adalah para pelaku evaluasi program. Data dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana para evaluator menggunakan model CIPP untuk mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Tiwa'a dan faktor yang memengaruhinya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Tiwa'a dilaksanakan dengan menggunakan model CIPP. Para evaluator adalah Pemerintah desa Tiwa'a, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di Desa Tiwa'a. Fungsi evaluasi yang dilakukan adalah fungsi diagnosa dan fungsi pengukuran tingkat keberhasilan program, dengan tataran evaluasi pada tingkat konteks dan input. Evaluasi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan empat faktor penghambat, yaitu jumlah personel sumber daya manusia yang belum memadai, keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dalam merancang program yang belum maksimal, tingkat pengetahuan evaluasi program dan teknis pelaksanaannya yang belum memadai, dan tindak lanjut evaluasi yang belum dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur lainnya seperti akademisi.

Kata Kunci: evaluasi program, pemberdayaan masyarakat, model CIPP, evaluator, *participatory monitoring and evaluation*

ABSTRACT

The community empowerment program in the institutional sector has not provided the benefits expected by the villagers of Tiwa'a, North Mori Sub-district, North Morowali Regency and needs to be evaluated. This study aims to explore the implementation of evaluating community empowerment program in institutional sector evaluation of Tiwa'a Village. This study is qualitative in nature with case study as the research design. The sources of data were the program evaluators, and the data were obtained from observation, interview, documentation. The results showed that the evaluation implementation of community empowerment program in Tiwa'a Village was implemented through CIPP model. The evaluators were local government of Tiwa'a Village, village council, village empowerment center, community leaders, youth leaders, and women leaders of Tiwa'a Village. The functions of evaluation implementation to evaluate the successful of community empowerment program in Tiwa'a village focused on context and input evaluation. The difficulties experienced in carrying out the program evaluation were the evaluators' lack of knowledge on the concept and technical implementation of evaluation and unideal participation of stakeholders and local people in evaluation process. It is recommended to involve other elements or parties in evaluating program and conducting trainings on the evaluation process and follow-ups for evaluators.

Keywords: *program evaluation, community empowerment, CIPP model, evaluator, participatory monitoring and evaluation*

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak yaitu pemerintah, *stakeholders*, dan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan program-program pemberdayaan masyarakat dengan merumuskan mekanisme penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi (Raharjana & Kutanegara, 2019; Thalib, 2015; W, 2021). Proses pembangunan partisipatif yang memberdayakan masyarakat desa diharapkan dapat menumbuhkembangkan kesadaran kritis dan kemandirian mereka sehingga mereka bukan lagi sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat menuju yang lebih baik dan mengatasi berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengangguran (Fitriana, 2020; Saifuddin Yunus et al., 2017). Pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan masalah kemiskinan, namun sekaligus dapat menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi, politik, dan kebudayaan. Oleh karena itu, diperlukan kritik dan pengawasan terhadap pemahaman pemberdayaan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaiannya dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Salah satu bentuk sinergitas antara pemerintah, *stakeholders*, dan masyarakat adalah keterlibatan semua unsur dalam mengevaluasi program-program pemberdayaan desa. Kepala Desa, misalnya, dapat mengajak masyarakat menjadi evaluator program yang mereka ikuti atau laksanakan. Hal ini akan membangkitkan kesadaran masyarakat dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka akan merasa memiliki dan merasakan manfaat langsung dari pembangunan di wilayah mereka. Dengan begitu, kondisi masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan dan mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik.

Hasil dari penelitian terdahulu tentang pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa para evaluator program menggunakan model CIPP (*context, input, process, and product*), yaitu model evaluasi yang menilai konteks, input, proses pelaksanaan, dan evaluasi input program tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin dan Sujanto di tahun 2020 menunjukkan bahwa model CIPP ini diterapkan untuk mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Mekarsari, dan menemukan bahwa pemerintah Desa Mekarsari menggunakan model tersebut dengan menitikberatkan pada evaluasi input program, apakah sumberdaya, sarana dan prasarana, serta anggaran yang dimiliki telah memadai dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa (Abidin & Sujanto, 2020). Penelitian serupa dilakukan oleh Sartika (2016) dengan fokus penelitian pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai evaluator, dan hasilnya menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta mengadopsi model CIPP untuk mengevaluasi program-program pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan. Pemprov DKI Jakarta telah memahami bagaimana model CIPP digunakan secara utuh untuk mengevaluasi keberhasilan program mereka meliputi evaluasi konteks, input, proses, dan produk.

Selain pemerintah, pihak-pihak yang berhak menjadi evaluator program pemberdayaan adalah tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, akademisi, dan perwakilan dari komunitas atau kelompok yang ada di masyarakat atau stakeholder lainnya, termasuk peneliti itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Putri di tahun 2020 memaparkan hasil evaluasi program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga yang dilaksanakan di salah satu kecamatan di Kota Pekanbaru, dimana peneliti sendiri menjadi evaluator program dan menerapkan model CIPP dalam proses evaluasinya (Putri, 2020). Penelitian ini menemukan bahwa model CIPP, ketika diterapkan secara utuh, efektif menggambarkan hasil program secara komprehensif, termasuk mendeteksi hambatan dan kelemahan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dievaluasi tersebut.

Narto dan Suparno melakukan penelitian tentang proses evaluasi program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh pihak *Public Affair Communication and Sustainability Coca Cola Company* di Semarang sebagai perancang program dan *stakeholder* sekaligus evaluator program (Narto &

Suparno, 2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa pihak evaluator menggunakan model CIPP yang difokuskan pada evaluasi konteks dan evaluasi proses, dan menemukan bahwa program pemberdayaan yang dirancang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat mandiri. Selain itu, Amiruddin, Hasniati, dan Yunus juga meneliti tentang peran PT. Ceria Nugraha Indotama selaku perancang program dan stakeholder sebagai evaluator programnya sendiri mengimplementasikan model CIPP untuk mengevaluasi konteks program pemberdayaannya di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. Evaluator ini (Amiruddin et al., 2020).

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa para evaluator mengadopsi model CIPP sesuai kebutuhan evaluasi program mereka, sehingga fokus evaluasinya bervariasi di antara para evaluator. Hanya evaluator dari pemerintah saja yang menggunakan model CIPP secara utuh untuk mengevaluasi programnya, yaitu pemerintah provinsi (Sartika, 2016) dan kecamatan (Putri, 2020), sedangkan evaluator lainnya yaitu stakeholder dan bahkan peneliti sendiri mengadopsi sebagian dari model CIPP, misalnya hanya untuk mengevaluasi input (Abidin & Sujianto, 2020), konteks (Amiruddin et al., 2020; Narto & Suparno, 2020), dan proses saja (Narto & Suparno, 2020). Untuk itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah selaku evaluator. Adanya perbedaan dalam implementasi model CIPP tersebut mendorong para peneliti untuk meneliti bagaimana model CIPP diterapkan oleh pemerintah, terutama di Pemerintah Desa Tiwa'a, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Desa Tiwa'a terletak di Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Mori Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa ini telah mengimplementasikan serangkaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa atau "Desa Membangun" untuk meresponi penetapan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada enam bidang program yang dirancang demi kemajuan dan pembangunan Desa, yaitu meliputi bidang pemerintahan, bidang kelembagaan, bidang kesehatan, bidang ekonomi masyarakat, bidang teknologi, dan bidang pendidikan. Program-program di bidang kelembagaan sangat penting karena memiliki tujuan dan sasaran yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Tiwa'a demi

menjalankan roda pembangunan desa. Bentuk program di bidang kelembagaan ini adalah pelatihan, penyelenggaraan kegiatan yang sesuai dengan kelompok masyarakat desa, serta peningkatan sarana dan prasarana.

Berdasarkan pengamatan awal dan diskusi pribadi dengan masyarakat Desa Tiwa'a, para peneliti menemukan fenomena bahwa program-program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menjadi salah satu topik yang penting untuk dikaji karena akan memiliki dampak negatif bagi kemajuan dan pembangunan desa. Untuk itu, peneliti merasakan pentingnya memberikan informasi tentang bagaimana program-program di bidang kelembagaan tersebut dievaluasi oleh para pelaku evaluasi. Mengingat betapa peran dan tanggung jawab evaluator dalam menilai keberhasilan suatu program, maka penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang bagaimana para evaluator program pemberdayaan masyarakat Desa Tiwa'a melaksanakan evaluasi program tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif yang dibutuhkan sebagai rujukan tentang peran pemerintah Desa dalam pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan tentang pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk mengembangkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera, melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran. Juga, memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki seperti sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan. Program yang dirancang untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa harus sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Selain itu, program yang dirancang tersebut haruslah berdasarkan pemikiran bahwa program tersebut nantinya akan meningkatkan dan memajukan kemampuan dan keterampilan masyarakat desa untuk mengelola kebutuhannya secara mandiri.

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja oleh para pelaku evaluasi untuk melihat dan mengukur tingkat keberhasilan program tersebut, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat. Idealnya, evaluasi program pemberdayaan dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku evaluasi dan masyarakat melalui rangkaian kegiatan partisipatif atau *participatory monitoring and evaluation* (Guijt, 2000; Sartika, 2016).

Model CIPP atau *context, input, process, and product* adalah salah satu model evaluasi program yang komprehensif untuk mengevaluasi suatu program, khususnya program-program sosial. Tujuan dari model ini diimplementasikan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan keberhasilan suatu program secara keseluruhan (Adellia & Prajawinanti, 2021; Narto & Suparno, 2020). Para pelaku evaluasi atau evaluator menggunakan model ini untuk mengevaluasi personil, organisasi, kebijakan-kebijakan, strategi operasional program, sumber daya yang digunakan, biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan, serta hasil positif dan negatif dari program tersebut.

Dalam menilai suksesnya suatu program pemberdayaan, setidaknya ada empat fungsi evaluasi yang hadir yaitu fungsi diagnosa, fungsi selektif, fungsi penempatan, dan fungsi pengukuran keberhasilan (Mertens & Wilson, 2019; Theodos & Firschein, 2015). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui atau mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan individu tertentu ketika ditempatkan di posisi atau jabatan tertentu dengan tanggung jawab yang berbeda dengan fungsi dan jabatan lainnya. Ini disebut sebagai fungsi diagnosa. Kemudian, evaluasi dilakukan untuk menyeleksi apakah individu tertentu tersebut memiliki kompetensi standar yang memadai jika ditempatkan di posisi atau jabatan tertentu. Fungsi ini disebut dengan fungsi selektif. Berikutnya, evaluasi digunakan untuk mengetahui posisi dan jabatan apa yang paling sesuai untuk individu tertentu. Ini disebut dengan fungsi penempatan. Yang terakhir, evaluasi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program yang telah dijalankan. Indikator keberhasilan tersebut meliputi metode pelaksanaan program, sarana dan prasarana, serta pencapaian tujuan program yang sudah direncanakan sejak awal program tersebut dirancang. Ini disebut dengan fungsi pengukuran keberhasilan.

Dalam penelitian ini, evaluasi konteks adalah evaluasi yang menekankan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa yang nantinya akan dipenuhi melalui program pemberdayaan. Pelaksanaan program dapat dipengaruhi oleh beragam faktor kebutuhan masyarakat desa, yaitu faktor-faktor budaya, kebijakan, struktur sosial serta kondisi ekonomi (Wholey, 2015). Evaluasi input adalah evaluasi yang menilai apakah kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat desa telah memadai untuk merencanakan dan melaksanakan program. Terkait hal tersebut, Holden dan Zimmerman menegaskan bahwa harus ada keseimbangan antara apa yang hendak dievaluasi dan apa sumber daya yang tersedia di masyarakat sasaran program tersebut (Holden & Zimmerman, 2009). Kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimaksud tersebut termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, dana atau anggaran, prosedur atau aturan-aturan yang diperlukan, serta sarana dan prasarana. Ketidakseimbangan antara program dan kuantitas serta kualitas sumber daya yang dimiliki masyarakat desa akan menghambat pelaksanaan program secara efektif, bahkan berdampak negatif terhadap pembangunan desa.

Lebih lanjut, Holden dan Zimmerman menjelaskan tentang pengembangan kapasitas individu dan kaitannya dengan perencanaan evaluasi. Evaluasi program yang direncanakan haruslah mempertimbangkan kapasitas organisasi atau individu dalam kegiatan evaluasi program pemberdayaan tersebut (Holden & Zimmerman, 2009). Jika organisasi maupun individu yang terlibat tidak memiliki keterampilan, pengetahuan, atau sumber daya yang diperlukan baik dalam mengevaluasi program, maka kegiatan evaluasi pun tidak akan akurat hasilnya atau berguna sebagai rekomendasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa harus diperkuat melalui beragam upaya seperti pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan teknis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan organisasi atau individu mengenai proses dan hasil evaluasi, serta bagaimana menggunakan informasi tersebut untuk menyusun program pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kinerja program tersebut selanjutnya.

Evaluasi proses bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program atau kegiatan telah dilaksanakan, kendala apa saja yang dihadapi selama pelaksanaannya, serta aspek mana yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Evaluasi proses berfokus pada pelaksanaan kegiatan, bukan hanya pada hasil akhirnya.

Dalam hal ini, para pelaksana kegiatan dan penerima manfaat dapat memahami program tersebut dengan lebih baik serta memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas program yang sedang berjalan. Kemudian evaluasi proses menitikberatkan pada sejauh mana pelaksanaan suatu program atau kegiatan telah dilaksanakan, apa saja kendala yang dihadapi, serta apa saja aspek yang harus diperbaiki dan ditingkatkan (Theodos & Firschein, 2015). Selanjutnya, evaluasi produk merupakan pengukuran pencapaian hasil program, baik hasil yang positif maupun negatif, termasuk manfaat yang dihasilkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Narto & Suparno, 2020). Evaluasi ini terjadi setelah program selesai dilaksanakan dan bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hasil program secara keseluruhan.

Pelaku Evaluasi Program Pemberdayaan

Berdasarkan *konsep participatory monitoring and evaluation*, para evaluator atau pelaku evaluasi program pemberdayaan adalah para *stakeholders* dan penerima manfaat dari program itu sendiri, seperti tokoh perempuan, tokoh masyarakat adat, tokoh pemuda, bahkan akademisi (Guijt, 2000; Lukman et al., 2023; Onyango, 2018; Sartika, 2016; Theodos & Firschein, 2015). Para evaluator adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menilai kinerja suatu program, meliputi dampak program terhadap masyarakat sasaran, identifikasi masalah-masalah yang terjadi selama pelaksanaan program dan apa saja yang perlu diperbaiki, serta memberikan saran dan rekomendasi untuk memperbaiki program. Evaluator program harus memiliki keterampilan menganalisis dan berpikir kritis, mampu berkomunikasi dengan baik, serta mampu bekerja sama dengan siapa saja dengan latar belakang yang berbeda (Lukman et al., 2023; Theodos & Firschein, 2015). Evaluator juga harus memiliki pengetahuan tentang program, apa tujuan dan hasil yang diharapkan dari program yang dinilai, serta apa kebutuhan masyarakat sasaran. tujuan dan hasil yang diharapkan dari program serta kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Pemerintah Desa adalah evaluator utama yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di desa dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa, dalam hal ini adalah Kepala Desa, memiliki

wewenang dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menetapkan peraturan desa, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa, membina kehidupan dan perekonomian masyarakatnya, mengajukan rancangan peraturan desa, mengkoordinasikan pembangunan desa kepada semua unsur masyarakat secara partisipatif, serta melaksanakan wewenang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Rumlus et al., 2017; Sahyana, 2019). Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat desa, antara lain mengajak pihak lain misalnya stakeholders untuk memastikan program terlaksana dengan baik, melakukan evaluasi dengan tujuan mengidentifikasi apa saja faktor-faktor penghambat proses pelaksanaan program serta apa saja kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi lewat program tersebut sehingga lebih tepat sasaran, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi program dalam forum-forum desa, menyediakan data dan informasi yang penting untuk menilai program, dan memberikan rekomendasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut (Fitriana, 2020; Hatry et al., 2015; Theodos & Firschein, 2015).

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Desa Tiwa'a yang terletak di Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, merupakan lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan hasil identifikasi fenomena yang dilakukan oleh peneliti. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara kepada 6 orang narasumber kunci yaitu Kepala Desa Tiwa'a, ketua BPD, satu tokoh masyarakat, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), satu tokoh pemuda, dan satu tokoh perempuan. Keenam narasumber kunci ini juga adalah evaluator. Selain wawancara, data juga diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara turun langsung ke Desa dan mengamati bagaimana para evaluator berinteraksi dengan masyarakat desa tentang manfaat program, dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan bahan tertulis terkait pelaksanaan evaluasi serta literatur yang relevan. Data yang dikumpulkan diolah

dengan model analisis dari Miles serta diinterpretasi berdasarkan teori evaluasi dan pelaku evaluasi (Miles, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pemberdayaan di Desa Tiwa'a, khususnya program pemberdayaan masyarakat bidang kelembagaan, dievaluasi oleh Kepala Desa, Kepala LPMD, Ketua BPD, dan unsur masyarakat yaitu tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Dalam penelitian ini, program yang dievaluasi adalah program pemberdayaan masyarakat bidang kelembagaan, yaitu pelatihan bagi aparat desa dan kelompok-kelompok masyarakat.

Fungsi Evaluasi Program

Berdasarkan hasil penelitian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, Pemerintah Desa Tiwa'a melaksanakan evaluasi program untuk memperoleh informasi apakah sumberdaya manusia yang dikerahkan untuk mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat sesuai atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, ditemukan informasi bahwa Desa belum memiliki sumberdaya manusia sebagai personil LPMD dengan jumlah yang memadai dan pengetahuan yang cukup akan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Salah satu kutipan wawancara dengan Kepala Desa diuraikan sebagai berikut,

“dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia personil LPMD yang ada, personil kurang memahami tugas pokok dan fungsi di desa sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat” (wawancara 9 Mei 2022)

Hasil wawancara dengan Kepala Desa tersebut juga didukung dengan pengamatan langsung ke kantor desa untuk mengetahui data ril personil LPMD, dan memang benar bahwa sumberdaya manusia personil LPMD masih rendah, terbukti dari minimnya kegiatan atau sosialisasi tugas pokok dan fungsi desa yang berkaitan dengan kapasitas SDM di bidang kelembagaan. Terkait dengan hal ini, selain Kepala Desa, Ketua BPD pun menyampaikan hal yang senada,

“dari apa yang saya amati selama ini berhubungan dengan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat selama ini masih kurang dilaksanakan, program-program yang lebih banyak

mendapat perhatian hanya program yang sifatnya pembangunan fisik.”
(wawancara 10 Mei 2022)

Untuk menambah dan memperkuat informasi dari Ketua BPD, para peneliti melakukan diskusi dengan beberapa anggota masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi, peneliti menemukan informasi bahwa program yang sifatnya pemberdayaan masih kurang dilaksanakan. Selain itu, hasil pengamatan langsung di desa serta diperoleh data bahwa pembangunan fisik lebih dominan dikerjakan di desa daripada program-program peningkatan kualitas SDM.

Berkaitan dengan hal tersebut, salah seorang tokoh pemuda sebagai responden yang diwawancarai mengutarakan hal berikut ini,

“program-program yang disusun dan dilaksanakan di desa, khususnya yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda, masih sangat minim.” (wawancara 11 Mei 2022)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang tokoh perempuan sebagai berikut :

“Para penyusun program harus melibatkan perempuan sehingga program yang dilaksanakan juga bermanfaat bagi perempuan desa”. (wawancara 11 Mei 2022)

Sebagai bahan perbandingan dari wawancara yang dilakukan terhadap tokoh pemuda dan tokoh perempuan, para peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa tokoh lainnya. Hasil wawancara juga menyebutkan hal yang sama, yaitu bahwa keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa selama ini masih kurang. Lebih lanjut lagi, dari wawancara, pengamatan dan diskusi, didapati hasil bahwa pemerintah desa Tiwa’a menggunakan evaluasi sebagai alat ukur atau instrumen instrument pengukuran tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di desa. Hal-hal yang diukur tersebut adalah pemanfaatan sumberdaya dan penggunaan sarana dan prasarana serta pencapaian tujuan yang telah disusun di awal penyusunan program, seperti yang dikemukakan oleh tokoh perempuan tersebut bahwa penyusun program seharusnya melibatkan seluruh unsur dalam menentukan program pemberdayaan yang akan dijalankan. Hal ini membuktikan bahwa sumberdaya manusia personil LPMD masih rendah karena belum memahami pentingnya melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam penyusunan program di desa.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa evaluasi program pemberdayaan masyarakat bidang kelembagaan di Desa Tiwa'a berfungsi untuk mendiagnosa apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Hal ini berarti sejalan dengan teori tentang fungsi evaluasi dari Theodos dan Firschein serta dari Mertens dan Wilson (dalam Mertens & Wilson, 2019; Theodos & Firschein, 2015), yaitu bahwa evaluasi program memiliki fungsi diagnosa dan fungsi pengukuran keberhasilan program. Fungsi diagnosa bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan seseorang untuk bidang kompetensi tertentu. Fungsi pengukuran keberhasilan bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah program yang telah dijalankan. Hal-hal yang dinilai ini termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana dan prasarana, serta pencapaian tujuan yang telah disusun di awal. Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Dari evaluasi yang dilakukan tersebut, teridentifikasi bahwa kurangnya SDM sebagai personil LPMD memengaruhi pelaksanaan program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, bahkan cenderung tidak memperhatikan pelaksanaannya, karena fokus terletak pada implementasi program yang bersifat pembangunan fisik saja.

Evaluasi Konteks dan Input

Hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan para narasumber membuktikan bahwa Pemerintah Desa telah melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program, seperti yang dikemukakan oleh Ketua LPMD berikut ini,

“Pemerintah desa selalu mendengar dan menerima saran serta usul dari kami selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada.” (wawancara 12 Mei 2022)

Pelaksanaan evaluasi yang melibatkan unsur-unsur masyarakat juga mengalami beberapa kendala, seperti yang dituturkan oleh Ketua BPD berikut ini,

“Pemerintah desa dalam evaluasi program – program desa sudah melibatkan semua lembaga di desa, akan tetapi dalam pelaksanaannya sering terjadi peserta rapat yang sudah diundang tetapi tidak hadir sehingga hasil rapat terkadang kurang dipahami oleh lembaga dan perwakilan masyarakat.” (wawancara 12 Mei 2022)

Sebagai bahan pembandingan dari kedua hasil wawancara diatas, dilakukan juga wawancara dengan beberapa anggota lembaga lain di desa yang juga mengatakan bahwa Pemerintah Desa selalu mengundang lembaga – lembaga yang ada di desa dalam setiap pelaksanaan rapat. Akan tetapi, keterbatasan sumberdaya manusia peserta rapat seringkali hasil rapat kurang dipahami.

Lebih lanjut lagi, seorang tokoh masyarakat Desa Tiwa'a menyatakan demikian,

“dalam pelaksanaan musyawarah desa pemerintah desa hanya mengundang sebagian masyarakat yang dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat, sehingga sering terjadi masyarakat lain ada yang kurang memahami dan kurang mengetahui tentang hasil rapat.”
(wawancara 13 Mei 2022)

Evaluasi yang ideal adalah evaluasi yang dilakukan dalam tataran penilaian konteks, input, proses, dan produk, serta melibatkan seluruh unsur (Guijt, 2000; Sartika, 2016). Berdasarkan hasil penelitian, para evaluator sudah menerapkan model evaluasi CIPP untuk menilai program pemberdayaan masyarakat bidang kelembagaan, namun evaluasi model tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh karena yang dilakukan adalah evaluasi pada tataran konteks dan input saja. Kemudian, unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi adalah dari Pemdes, BPD, LPMD, perwakilan tokoh perempuan, perwakilan tokoh pemuda, dan perwakilan tokoh masyarakat. Hanya saja, partisipasi dari masyarakat belum maksimal karena perwakilan tersebut ternyata tidak cukup memadai sesuai dengan kebutuhan evaluasi, dan seharusnya melibatkan seluruh pihak, terutama para penerima manfaat dari program-program yang dilaksanakan. Peneliti juga menemukan bahwa belum ada tindak lanjut yang terdokumentasi dari Pemdes tentang penyebab ketidakhadiran tokoh-tokoh yang diundang dalam rapat evaluasi sehingga tidak ada hasil evaluasi tentang partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan di lingkungan mereka.

Ada empat faktor penghambat pelaksanaan evaluasi yang ditemukan oleh peneliti. Faktor pertama adalah jumlah personel sumber daya manusia yang belum memadai untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan teori dari Holden dan Zimmerman yang mengatakan bahwa faktor kualitas dan kuantitas sumber daya, termasuk sumber

daya manusia, adalah faktor yang penting untuk dievaluasi, karena jika faktor tersebut belum memadai, maka program pemberdayaan tidak akan terlaksana sesuai harapan (Holden & Zimmerman, 2009).

Faktor kedua adalah program yang dirancang belum sepenuhnya melibatkan perwakilan dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat seperti kelompok pemuda dan kelompok perempuan. Temuan ini membuktikan teori dari Holden dan Zimmerman serta Wholey bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting karena mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh program tersebut, atau penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program pemberdayaan masyarakat (Holden & Zimmerman, 2009; Wholey, 2015). Ramly dkk turut menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya melibatkan masyarakat untuk aktif melaksanakan evaluasi, tapi juga melatih keterampilan mereka dalam melakukan evaluasi dalam bentuk program sosialisasi, seminar, bimtek, workshop, atau bentuk-bentuk lainnya (Ramly et al., 2018).

Faktor ketiga adalah tingkat pengetahuan akan evaluasi program pemberdayaan dan teknis pelaksanaan evaluasi program yang masih belum memadai. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan faktor yang pertama, yang membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia di Desa Tiwa'a belum memadai mereka belum dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan evaluasi program. Akibatnya, program-program tidak dievaluasi secara efektif sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk mengetahui apakah program tersebut sudah tepat sasaran dan sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Temuan ini kembali membuktikan sejalan dengan teori tentang pengembangan kapasitas dalam perencanaan evaluasi yang ditegaskan oleh Holden dan Zimmerman (Holden & Zimmerman, 2009). Dalam hal ini, pengetahuan dan keterampilan evaluasi program menjadi sangat penting bagi pelaksana evaluasi, terutama dalam menilai kualitas program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan memastikan bahwa program tersebut berdampak positif pada kehidupan masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, pelatihan dan dukungan teknis harus disediakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan evaluasi program pemberdayaan masyarakat, sehingga evaluasi dapat dilakukan

secara efektif dan hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki program dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang dilayaninya.

Faktor keempat adalah tindak lanjut evaluasi yang belum dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur lainnya seperti akademisi. Temuan ini mendukung teori dan penjelasan dari Lukman, serta Theodos dan Firschein (dalam Lukman et al., 2023; Theodos & Firschein, 2015) bahwa akademisi merupakan mitra pemerintah yang memiliki kompetensi keahlian di bidangnya, serta terampil dan terlatih dalam metodologi penelitian dan analisis data. Data yang diperoleh dari pemerintah desa dapat diolah oleh akademisi sehingga bisa digunakan untuk merancang program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat desa. Dampak negatif dari ketiga faktor yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diminimalisir dengan melibatkan unsur lainnya dalam pelaksanaan dan evaluasi program pemberdayaan, seperti unsur dari praktisi dan akademisi, mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok di Desa Tiwa'a, dan mengadakan pelatihan khusus bagi para evaluator yang berkaitan dengan proses evaluasi dan tindak lanjutnya. Selain itu, karena sifatnya yang independen, keterlibatan akademisi evaluasi program pemberdayaan dapat meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelaksanaan program tersebut. Keterlibatan akademisi dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat desa bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah benar-benar bermanfaat bagi mereka dan bukan hanya formalitas belaka.

SIMPULAN

Evaluasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Tiwa'a dilaksanakan dengan menggunakan model CIPP. Para evaluator adalah Pemdes Tiwa'a, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di Desa Tiwa'a. Fungsi evaluasi yang dilakukan adalah fungsi diagnosa dan fungsi pengukuran tingkat keberhasilan program, dengan tataran evaluasi pada tingkat konteks dan input. Evaluasi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan empat faktor penghambat, yaitu jumlah personel sumberdaya manusia yang belum memadai, keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dalam merancang program yang belum maksimal, tingkat pengetahuan evaluasi program dan teknis pelaksanaannya yang

belum memadai, dan tindaklanjut evaluasi yang belum dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur lainnya seperti akademisi. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini ditujukan kepada pihak evaluator dan juga kepada peneliti selanjutnya yang berminat melakukan kajian atau penelitian lanjutan tentang evaluasi program pemberdayaan masyarakat, yaitu melibatkan unsur lainnya dalam proses pelaksanaan evaluasi dan tindaklanjut hasil evaluasi serta mengadakan pelatihan tentang proses evaluasi dan tindaklanjutnya bagi para evaluator.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, B., & Sujianto, F. Y. (2020). Evaluasi Program Desa Mekarsari. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16, 84–88.
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/7933/6130>
- Adellia, Y., & Prajawinanti, A. (2021). Implementasi model evaluasi cipp pada pelaksanaan program kelompok belajar TBM Leshutama era pandemi covid-19. *Pustaka Karya : Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 9(2), 14. <https://doi.org/10.18592/pk.v9i2.5516>
- Amiruddin, I., Yunus, M., Publik, D. A., Hasanuddin, U., Publik, D. A., & Hasanuddin, U. (2020). *Evaluasi Konteks Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Ceria Nugraha Indotama di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka*. 6(3), 351–364.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4299>
- Fitriana, N. (2020). *Revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat* (D. Kusumaningsih & A. In'am (eds.)). BILDUNG.
- Guijt, I. (2000). Learning from change: Issues and experiences in participatory monitoring and evaluation. In M. Estrella, J. Blauert, D. Campilan, J. Gaventa, J. Gonsalves, I. Guijt, D. Johnson, & R. Ricafort (Eds.), *Learning from change: Issues and experiences in participatory monitoring and evaluation* (pp. 201–217). Intermediate Technology Publications Ltd.
- Hatry, H. P., Newcomer, K. E., & Wholey, J. S. (2015). EVALUATION

- CHALLENGES, ISSUES, AND TRENDS. In K. E. Newcomer, H. P. Hatry, & J. S. Wholey (Eds.), *HANDBOOK OF PRACTICAL PROGRAM EVALUATION* (4th Editio, pp. 816–832). John Wiley & Sons, Inc.
- Holden, D. J., & Zimmerman, M. A. (2009). Evaluation planning: Here and now. In D. J. Holden & Marc A. Zimmerman (Eds.), *A practical guide to program evaluation planning* (pp. 7–29). SAGE Publications Ltd.
- Lukman, G. A., Raharjo, S. T., Resnawaty, R., & Humaedi, S. (2023). Pemangku kepentingan (stakeholders) dalam program kawasan masyarakat (KEM) Bengkala (program CSR PT Pertamina DPPU Ngurah Rai). *Share: Social Work Jurnal*, 2(2), 98–109. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.37024>
- Mertens, D. M., & Wilson, A. T. (2019). Program Evaluation Theory and Practice. In *Program Evaluation Theory and Practice* (2nd ed.). The Guilford Press.
- Miles, M. B. (2014). *Qualitative data analysis : a methods sourcebook*. Third edition. Thousand Oaks, Califorinia : SAGE Publications, Inc., [2014]. <https://search.library.wisc.edu/catalog/9910191165602121>
- Narto, S., & Suparno, B. A. (2020). Evaluasi Program Corporate Social Responsibility Pelatihan Ecobrick dalam Mengelola Sampah Plastik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(3), 295. <https://doi.org/10.31315/jik.v17i3.3778>
- Onyango, R. O. (2018). *Participatory Monitoring and Evaluation : An Overview of Guiding Pedagogical Principles and Implications on Development*. 5(4), 428–433. <https://www.noveltyjournals.com/upload/paper/Participatory Monitoring-1492.pdf>
- Putri, R. (2020). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Pmbrw). *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 63. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.2.p.63-70>
- Raharjana, D. T., & Kutanegara, P. M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Cagar Budaya. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 5(1), 50–65. <https://doi.org/10.24821/jtks.v5i1.3145>
- Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2018). Ekonomi Desa Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. In *Natural Aceh. Natural Aceh*.
- Rumlus, R., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam

Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa
 Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat).

Jurnal Eksekutif, 1(1), 1–12.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/1619>

1

Sahyana, Y. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
 (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut
 Provinsi Jawa Barat). *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*,
 9(2), 157–181. <https://doi.org/10.33701/jt.v8i2.618>

Saifuddin Yunus, Suadi, & Fadli. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat
 Terpadu* (Vol. 31, Issue 2). Bandar Publishing.
<https://repository.unimal.ac.id/5257/>

Sartika, I. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
 Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen
 Pembangunan*, 4(1), 1–23.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/196/>

Thalib, T. (2015). Program pemberdayaan perempuan melalui organisasi
 pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Monano Kecamatan
 Bone Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*,
 II(1), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v2i1.84>

Theodos, B., & Firschein, J. (2015). Evaluating community change programs. In K.
 E. Newcomer, H. P. Hatry, & J. S. Wholey (Eds.), *Handbook of Practical
 Program Evaluation* (4th Editio, pp. 259–280). John Wiley & Sons, Inc.

W, R. W. A. (2021). Monitoring Dan Evaluasi Program Corporate Social
 Responsibility Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Komitmen: Jurnal
 Ilmiah Manajemen*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.15575/jim.v2i1.12476>

Wholey, J. S. (2015). Exploratory Evaluation. In K. E. Newcomer, H. P. Hatry, &
 J. S. Wholey (Eds.), *Handbook of Practical Program Evaluation* (4th Eds.,
 pp. 88–107). John Wiley & Sons, Inc.